

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, dan analisis yang dilakukan terkait sektor pariwisata terhadap tingkat kemiskinan di daerah 3T Nusa Tenggara Timur selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah kunjungan wisatawan ke daerah 3T Nusa Tenggara Timur pada dasarnya memberikan kecenderungan untuk menurunkan angka kemiskinan, namun pengaruhnya masih sangat kecil dan belum terasa nyata bagi masyarakat. Kehadiran wisatawan memang berpotensi membawa peluang ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi barang dan jasa lokal, terbukanya kesempatan usaha, dan bertambahnya lapangan kerja. Akan tetapi, kondisi di daerah 3T yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata menyebabkan dampak kunjungan wisatawan belum optimal dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan saja tidak cukup untuk menekan angka kemiskinan, kecuali jika disertai dengan strategi pemberdayaan masyarakat lokal agar lebih terintegrasi dalam rantai ekonomi pariwisata.
2. Jumlah objek wisata terbukti memberikan pengaruh yang nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah 3T Nusa Tenggara Timur. Semakin banyak destinasi wisata yang dikembangkan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik melalui penyediaan jasa wisata, perdagangan, transportasi, maupun usaha kecil menengah di sekitar lokasi wisata. Keberadaan objek wisata tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan objek wisata berperan penting dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong perputaran ekonomi lokal yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Dengan demikian, peningkatan jumlah objek wisata dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat peran sektor pariwisata sebagai sarana pengentasan kemiskinan di wilayah 3T.

3. Penerimaan pajak hotel terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah 3T. Semakin banyak hotel yang berdiri dan berkembang, semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah. Perkembangan perhotelan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik secara langsung sebagai tenaga kerja hotel, maupun secara tidak langsung melalui sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, jasa laundry, hingga penyediaan bahan makanan. Dengan adanya efek ganda ini, peningkatan aktivitas perhotelan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah dan pada akhirnya menekan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hotel merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pariwisata dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.
4. Pajak restoran menunjukkan kecenderungan ke arah yang sama dengan pajak hotel, yaitu dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, namun pengaruhnya masih belum optimal. Kondisi ini terjadi karena sektor kuliner di daerah 3T sebagian besar masih berupa usaha kecil dan menengah, seperti warung makan tradisional, rumah makan sederhana, serta usaha kuliner skala keluarga yang belum terorganisir secara formal. Akibatnya, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah relatif kecil dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan belum terasa kuat. Walaupun demikian, sektor kuliner memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Apabila usaha kuliner dikelola lebih profesional, mendapat dukungan pemerintah, dan mampu menarik lebih banyak wisatawan, maka pajak restoran bisa menjadi sumber penting bagi pendapatan daerah sekaligus sarana untuk memperluas lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua indikator sektor pariwisata memberikan dampak yang konsisten terhadap penurunan kemiskinan, maka beberapa saran berikut disampaikan secara lebih spesifik:

1. Diperlukan strategi yang lebih terarah agar kehadiran wisatawan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan pariwisata perlu mendorong keterlibatan masyarakat lokal secara lebih aktif dalam aktivitas pariwisata, misalnya melalui pelatihan keterampilan, pengembangan produk UMKM, serta peningkatan kapasitas dalam pelayanan wisata. Selain itu, perbaikan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi juga perlu diperhatikan agar wisatawan semakin nyaman berkunjung dan lama tinggal. Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya menambah angka statistik kunjungan, tetapi juga benar-benar menjadi sumber peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan bagi masyarakat di daerah 3T.
2. Pemerintah daerah bersama pelaku pariwisata perlu terus mendorong pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata baru yang berkelanjutan serta melestarikan objek wisata yang sudah ada. Pengembangan ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek fisik destinasi, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas pariwisata, misalnya sebagai pengelola homestay, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, maupun pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Selain itu, perlu adanya promosi yang lebih intensif serta peningkatan kualitas infrastruktur penunjang, sehingga objek wisata dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah objek wisata tidak hanya memperkuat daya tarik daerah, tetapi juga berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan di wilayah 3T.

3. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan sektor perhotelan di daerah 3T. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan infrastruktur penunjang pariwisata, memperbaiki aksesibilitas, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak hotel yang tumbuh dan berkembang. Peningkatan kualitas hotel juga penting untuk menarik wisatawan dalam jumlah lebih besar sehingga dampaknya pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih optimal. Selain itu, penerimaan pajak hotel sebaiknya dikelola secara transparan dan dialokasikan pada program-program yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat miskin, sehingga manfaat dari sektor perhotelan benar-benar dirasakan secara luas.
4. Sektor kuliner di daerah 3T masih perlu mendapat dukungan agar kontribusinya terhadap perekonomian semakin nyata. Pemerintah daerah diharapkan memberikan pelatihan manajemen usaha, pengolahan makanan, dan peningkatan kualitas pelayanan bagi pelaku usaha restoran serta usaha kuliner kecil menengah. Dengan adanya pembinaan dan dukungan modal, usaha kuliner dapat berkembang lebih profesional, mampu menarik wisatawan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini pada gilirannya akan memperluas lapangan kerja dan membantu menekan angka kemiskinan. Perlu juga dilakukan pengawasan dan pembinaan agar lebih banyak usaha kuliner terdaftar secara resmi, sehingga penerimaan pajak restoran lebih optimal dan berdampak pada pembangunan daerah.

### **5.3 Keterbatasan Studi**

Penelitian ini telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel yang digunakan dalam melihat pengaruh sektor pariwisata terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini hanya menggunakan jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, pajak hotel, dan pajak restoran sebagai proksi aktivitas pariwisata,

sementara faktor-faktor lain yang juga berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan, tidak dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh sektor pariwisata terhadap penurunan kemiskinan di daerah 3T.

2. Penelitian ini hanya mencakup kurun waktu 2019–2023, sehingga tidak mampu menangkap dinamika jangka panjang sektor pariwisata terhadap kemiskinan, khususnya dalam merespons perubahan kebijakan, pembangunan infrastruktur, maupun kondisi eksternal seperti pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi sektor pariwisata.

